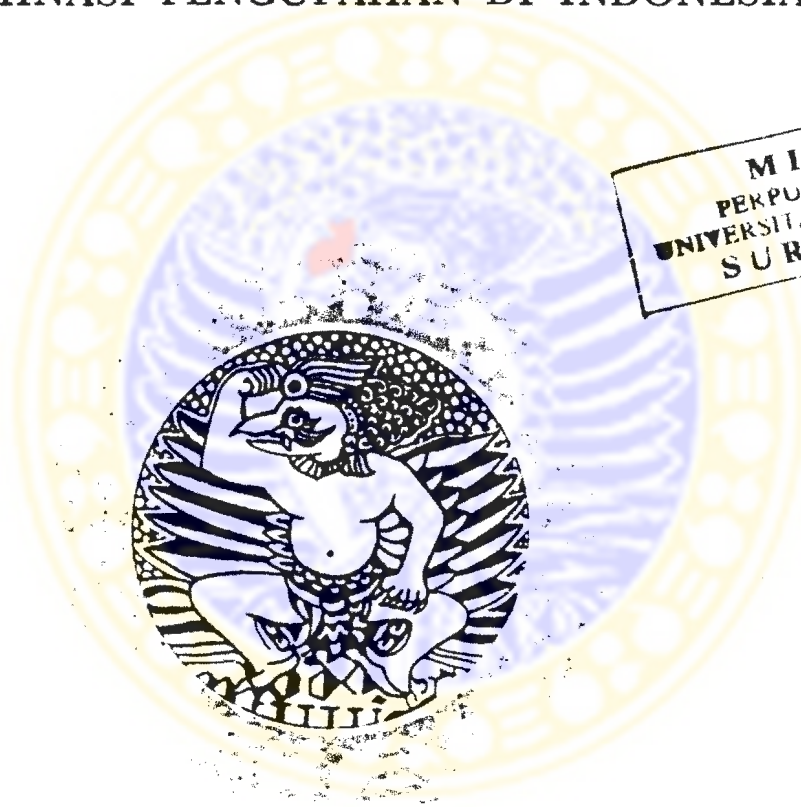


KIR  
Per 04/01  
Ch  
m

**SKRIPSI**

***AULIA CHANDRA***

**UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP BURUH PEREMPUAN DARI  
DISKRIMINASI PENGUPAHAN DI INDONESIA**



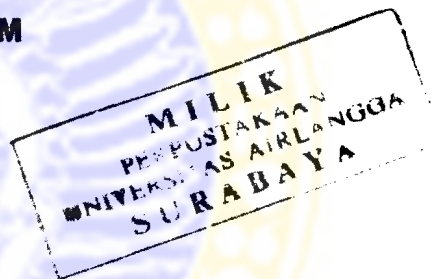
**MILIK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2001**

**UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP BURUH PEREMPUAN DARI  
DISKRIMINASI PENGUPAHAN DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN SEBAGAI PENULISAN AKHIR  
PROGRAM SARJANA STRATA SATU (S1)  
BIDANG ILMU HUKUM**



**Dosen Pembimbing,**

**Penyusun,**

A handwritten signature in black ink, belonging to Lanny Ramli. The signature is stylized and appears to be a combination of letters and a few flourishes.

**Lanny Ramli, S.H., M.S.**  
**NIP. 131 878 388**

A handwritten signature in black ink, belonging to Aulia Chandra. The signature is stylized and appears to be a combination of letters and a few flourishes.

**Aulia Chandra**  
**NIM. 039714463**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2001**

## BAB IV

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum dalam hal diskriminasi pengupahan terhadap buruh perempuan di Indonesia dilakukan dengan jalan :

- Meratifikasi Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 dan Konvensi Mengenai Pengupahan yang Sama Bagi Pekerja Laki-laki dan Perempuan untuk Pekerjaan yang sama Nilainya dalam Undang-Undang Nomor 80 tahun 1957, dan
- Mengatur ketentuan mengenai larangan bagi pengusaha untuk melakukan diskriminasi pengupahan terhadap buruh perempuannya dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1981 tentang Perlindungan Upah.

Namun ketentuan ini tidak diikuti oleh peraturan perundang-undangan di bawahnya, yaitu Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor KEP-81/M/BW/1995 tentang Penetapan Komponen Kebutuhan Hidup Minimum, karena dalam menetapkan komponen Kebutuhan Hidup Minimum hanya berpedoman pada perhitungan biaya hidup standar buruh laki-laki lajang dan tidak memperhatikan kebutuhan rutin buruh perempuan.

perempuan di Indonesia dilakukan dengan :

- Memberikan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1981, yang berupa kewajiban pengusaha untuk mengembalikan pembayaran upah buruh perempuan yang tertahan sebagai akibat dari tindakan diskriminasi pengupahan tersebut, dan
- Memberikan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1981, yang berupa pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Namun, sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1981 terlalu ringan dan sangat tidak efektif bila digunakan untuk menyelesaikan permasalahan diskriminasi pengupahan terhadap buruh perempuan. Oleh karena itu diharapkan aparat penegak hukum tidak hanya menjatuhkan sanksi pidana saja, melainkan juga disertai dengan sanksi administrasi. Dijatuhkannya kedua sanksi tersebut secara kumulatif dirasa lebih adil bagi buruh yang telah mengalami diskriminasi pengupahan dan bertujuan untuk memperbaiki keadaan serta menghentikan pelanggaran.

## 2. Saran

Sebagai akhir dari penulisan skripsi ini akan disampaikan saran yang diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam mengkaji permasalahan diskriminasi pengupahan terhadap buruh perempuan, antara lain :

1. Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor KEP-81/M/BW/1995 tentang Penetapan Komponen Kebutuhan Hidup Minimum yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1981 tentang Perlindungan Upah harus diganti dengan Surat Keputusan baru yang memasukkan kebutuhan rutin buruh perempuan dalam menentukan komponen kebutuhan. Dengan demikian dasar perhitungan upah tidak hanya didasarkan pada kebutuhan hidup minimum buruh laki-laki lajang.
2. Pemerintah harus lebih tegas dalam menindak pengusaha yang melakukan diskriminasi pengupahan terhadap buruh perempuan dengan menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi secara kumulatif agar dapat dirasa lebih adil bagi buruh perempuan yang telah mengalami diskriminasi pengupahan.
3. Pemerintah harus mempertegas pengawasan terhadap perjanjian yang dibuat antara pengusaha dan buruh sebelum menandatangani, apakah perjanjian tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada atau tidak.
4. Akses buruh perempuan dalam kekuasaan dan proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan nasib dan kesejahteraannya perlu



Demikianlah catatan terhadap permasalahan diskriminasi pengupahan terhadap buruh perempuan di Indonesia.

